

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Inzirah Nabila Aisy¹, Jumaidi², Sri Agusmila Aneta Herlinda³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: inzirahnabilaaisy220@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen sarana dan prasarana adalah salah satu aspek penting untuk mendukung kelancaran operasional di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai. Beberapa permasalahan yang memengaruhi manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai seperti tembok Lapas terlalu rendah, adanya kondisi overkapasitas, dan ruang tunggu dan ruang kunjungan kecil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *Purposive Sampling* berjumlah sebelas orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan melakukan *member check* adalah bagian dari uji kredibilitas data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek yaitu Pertama, aspek Perencanaan dapat dilihat dari tujuan utama belum terlaksana dengan semestinya dan anggaran yang direncanakan belum optimal. Kedua, aspek Pengorganisasian dapat dilihat dari sumber daya manusia masih kekurangan, tetapi tetapi dari kinerjanya sudah cukup bagus dan standar belum memadai. Ketiga, aspek Pelaksanaan dapat dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana masih minim, pemeliharaan fasilitas yang pelaksanaannya rutin dilakukan, tetapi prosesnya masih kurang baik, dan tanggung jawab petugas belum cukup baik. Keempat, aspek Pengawasan dapat dilihat dari pengawasan kondisi sarana dan prasarana sudah baik dan mengevaluasi kinerja petugas sudah baik dan rutin dilakukan. Adapun faktor penghambat manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kepedulian dari petugas terhadap kondisi sarana dan prasarana, serta adanya kondisi penghuni yang overkapasitas. Faktor pendorong manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai adalah evaluasi yang rutin dilakukan dan kinerja petugas.

Kata Kunci : Manajemen, Sarana dan Prasarana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Management of facilities and infrastructure is one of the important aspects to support smooth operations in Class II B Amuntai Penitentiary. Several problems that affect the management of facilities and infrastructure in Class II B Amuntai Penitentiary such as the prison walls are too low, overcapacity conditions, and small waiting rooms and visiting rooms. The purpose of this study was to determine the management of facilities and infrastructure in Class II B Amuntai Penitentiary and to determine the factors that affect the management of facilities and infrastructure in Class II B Amuntai Penitentiary. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data sources were taken through purposive sampling of eleven people. After the data was collected, it was analyzed using techniques including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Increasing perseverance, triangulation, using reference materials, and conducting member checks are part of the data credibility test. The results of the study indicate that the Management of Facilities and Infrastructure in Class II B Amuntai Penitentiary is still not good. This can be seen from the following aspects: First, the Planning aspect can be seen from the main objectives that have not been implemented properly and the planned budget is not optimal. Second, the

Organizing aspect can be seen from the human resources that are still lacking, but from the performance it is quite good and the standards are not adequate. Third, the Actuating aspect can be seen from the procurement of facilities and infrastructure that is still minimal, the maintenance of facilities that are routinely carried out, but the process is still not good, and the responsibility of officers is not good enough. Fourth, the Controlling aspect can be seen from the supervision of the condition of facilities and infrastructure that is good and evaluating the performance of officers is good and routinely carried out. The inhibiting factors for the management of facilities and infrastructure at the Class II B Amuntai Penitentiary are budget constraints, lack of human resources, lack of concern from officers for the condition of facilities and infrastructure, and the existence of overcapacity inmates. The driving factors for the management of facilities and infrastructure at the Class II B Amuntai Penitentiary are routine evaluations and officer performance.

Keywords: Management, Facilities and Infrastructure, Penitentiary

PENDAHULUAN

Manajemen sarana dan prasarana adalah salah satu aspek penting untuk mendukung kelancaran operasional Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di Indonesia, Lapas memiliki peran strategis dalam pembinaan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah bebas. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembinaan ini adalah kondisi dan pengelolaan sarana serta prasarana yang ada di Lapas. Sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi narapidana serta petugas Lapas. Di sisi lain, manajemen yang buruk terhadap sarana dan prasarana dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti over kapasitas, minimnya fasilitas kesehatan, kurangnya area untuk pelatihan, dan gangguan keamanan yang berpotensi menimbulkan keributan di dalam Lapas. Ketersediaan sarana dan prasarana ini mempengaruhi kondisi lingkungan di dalam Lapas, termasuk kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pembinaan yang dilakukan. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana di Lapas menjadi hal yang krusial dalam menjaga kelancaran operasional dan pencapaian tujuan Lapas.

Indonesia adalah negara hukum (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945), maka segala tindakan dan penyelenggaraan Lapas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan. Demikianlah lembaga pemasyarakatan menjalankan tugasnya, di mana kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum didasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemidanaan, menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah untuk memberikan pelajaran kepada para pelanggar hukum tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembalikan mereka menjadi masyarakat yang baik, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat hidup dengan damai dan aman. Hal ini termasuk mengajarkan para pelanggar untuk menghormati hukum dan mematuhi prinsip-prinsip moral, sosial, dan agama.

Peran manajemen dalam pengelolaan sarana dan prasarana menjadi krusial. Manajemen yang baik membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, meningkatkan kualitas fasilitas yang tersedia, serta merencanakan perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, baik dari dalam Lapas maupun dari instansi pemerintah terkait, sangat diperlukan untuk mendukung proses perencanaan dan pengembangan fasilitas di Lapas ini. Manajemen sarana dan prasarana tidak hanya melibatkan pengelolaan fisik bangunan dan fasilitas yang ada, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal. Proses ini meliputi pemeliharaan rutin terhadap bangunan dan fasilitas, pengadaan peralatan yang dibutuhkan, serta pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan dan pengembangan sarana.

Penelitian ini juga relevan mengingat adanya tuntutan dari masyarakat dan pemerintah agar sistem pemasyarakatan di Indonesia terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal pengelolaan fasilitas di dalam Lapas. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi bagi perbaikan pengembangan manajemen sarana dan prasarana di Lapas, tidak hanya di Lapas Kelas II B Amuntai, tetapi juga di lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis temukan di Lapas Amuntai memiliki kendala dalam Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, sehingga peneliti menjadikan Lapas tersebut sebagai lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun fenomena masalah yang peneliti temui, yaitu: Lapas Kelas II B Amuntai belum mengikuti standar bangunan Lapas yang baru, seperti tembok Lapas terlalu rendah, sehingga risiko narapidana kabur terlalu mudah, adanya kondisi overkapasitas dapat menyebabkan kualitas hidup narapidana kurang stabil dengan fasilitas dasar seperti ruang tempat tidur yang sempit dan kamar mandi yang tidak mencukupi dalam satu kamar narapidana, dan ruang tunggu dan ruang kunjungan kecil, sehingga tidak tercukupinya tempat yang disediakan untuk keluarga narapidana.

Fokus penelitian ini mengenai Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai adalah manajemen sarana dan prasarana di Lapas. Dalam penelitian ini memfokuskan menggunakan teori manajemen yang dijelaskan menurut Teori George R. Terry, faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*).

Penelitian sebelumnya “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong” dalam penelitian tahun 2023 oleh Aulia Fatmawati dan Saidah Hasbiyah dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong kurang baik. Pengelolaan yang sudah baik dilihat pada tahap pengorganisasian dengan mengelompokkan kegiatan dan menetapkan tugas, pada tahap penggerakkan yaitu adanya pembagian kerja setiap bagian. Sementara itu, pada tahap perencanaan, ketika merumuskan kegiatan dan bentuk kegiatan yang diinginkan, pada tahap pengorganisasian ketika Sumber Daya Manusia dikumpulkan, pada tahap penggerakkan, ketika mengoptimalkan kegiatan, dan pada tahap pengawasan, ketika kinerja dimonitor dan dievaluasi, terlihat jelas bahwa dana desa masih belum dikelola dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Atika Rahayu, Endang Erawan, dan Enos Pässele pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman pada tahun 2021. Judul penelitian tersebut adalah “Manajemen Organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMANEGA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, HIMANEGA dan fakultas yang saling berkoordinasi telah berhasil merencanakan Manajemen Organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMANEGA). Pengorganisasian dan pengarahan yang dilaksanakan untuk mendukung manajemen organisasi HIMANEGA telah dilakukan. HIMANEGA telah mengarsipkan semua komponen yang ada sebagai bagian dari pengawasan terkait sarana dan prasarana yang dimiliki.

Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa: pengelolaan atau manajemen adalah sebuah proses atau kerangka yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menentukan dan mencapai target dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Muhfizar dkk, 2021). Karena semua manajer, terlepas dari tingkat keahlian mereka, diharuskan untuk menyelesaikan serangkaian tugas yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan mereka, manajemen dicirikan sebagai suatu proses. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawas merupakan bagian dari proses tersebut (Widiana, 2020). Menurut Sukmadinata (2000), manajemen sarana dan prasarana memerlukan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan secara efektif dan optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkah tersebut meliputi perencanaan,

pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana yang tidak diperlukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu sebuah metode yang memberikan gambaran atau representasi fakta yang sesuai dengan kondisi nyata dari subjek penelitian. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi kontekstual yang berujung pada penggambaran menyeluruh mengenai kasus yang diteliti, disertai dengan penjelasan yang mendalam mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan temuan di lapangan. Peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* untuk memilih sebelas orang sebagai sumber data untuk penelitian ini. Menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Muhfizar dkk, 2021), yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, uji kredibilitas data penelitian dinilai melalui peningkatan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan melakukan *member check*.

PEMBAHASAN

A. Manajemen Sarana dan Prasarana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai

Seluruh warga binaan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai perlu ikut serta dalam memajemen sarana dan prasarana yang ada di Lapas. Manajemen sarana dan prasarana berfokus pada pengelolaan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pembinaan, keamanan, dan kenyamanan baik bagi narapidana maupun petugas lapas. Adanya manajemen ini berguna untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pembinaan narapidana, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional lapas. Penelitian ini dijelaskan melalui teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Muhfizar dkk, 2021), yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*).

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan mencakup proses menentukan tujuan, strategi, dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Proses ini melibatkan analisis situasi saat ini, identifikasi tujuan yang ingin dicapai, dan penetapan langkah-langkah spesifik serta sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan membantu organisasi atau individu untuk mengarahkan tindakan, mengurangi ketidakpastian, mengelola risiko, dan memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

a. Tujuan Utama

Tujuan utama adalah hasil akhir yang ingin diraih dalam suatu proses, rencana, atau kegiatan. Tujuan ini menjadi arah atau pedoman utama yang menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Tujuan utama membantu tetap fokus dan membuat keputusan yang selaras dengan hasil yang diinginkan. Tujuan utama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai terkait manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa bahwa tujuan utama dari Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai belum terlaksana dengan semestinya, karena masih terdapat kendala-kendala dalam pengelolaannya, seperti kurangnya anggaran untuk pemeliharaan fasilitas, jumlah Sumber Daya Manusia yang masih kurang sehingga belum sesuai dengan fasilitas yang dikelola, dan penghuni yang overkapasitas menghambat manajemen sarana dan prasarana belum menyeluruh.

b. Anggaran

Strategi investasi yang menguraikan proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu dikenal sebagai anggaran. Anggaran juga menjadi alat evaluasi kinerja, karena memungkinkan pihak terkait untuk membandingkan realisasi keuangan dengan perencanaan, sehingga dapat mengidentifikasi deviasi dan membuat keputusan yang lebih baik ke depannya. Penelitian ini berkaitan dengan anggaran yang digunakan untuk merencanakan administrasi sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai. .

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa perencanaan anggaran sudah diusulkan setiap tahun tetapi belum optimal, karena ketidaksesuaian antara anggaran yang diajukan dengan anggaran yang diperoleh, masih kurangnya monitoring yang teratur terkait apa-apa saja yang perlu dianggarkan. Anggaran yang diterima masih kurang, karena anggaran terfokus di pusat untuk pembangunan lapas-lapas baru, anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dasar narapidana dan pembinaan sedangkan sisanya untuk gaji karyawan. Upaya-upaya yang dilakukan Lapas dalam penanganan anggaran yang terbatas ini adalah membuat proposal ke pihak ketiga, seperti dari BRI berupa perbaikan plafon PVC dan pengaspalan halaman oleh Dinas PUPR.

2. **Organizing (Pengorganisasian)**

Sebuah organisasi atau proyek terorganisir ketika sumber daya, tugas, dan aktivitasnya dikelompokkan dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencapaian tujuan yang efisien dan sukses. Sebagai bagian dari proses pengorganisasian, kerangka kerja dibuat, tugas-tugas diberikan, dan saluran komunikasi dan kerja sama disiapkan.

a. Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, serta upaya untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan agar dapat berkontribusi secara maksimal. Kinerja sumber daya manusia dalam pengelolaan sarana dan prasarana lapas menjadi fokus penelitian ini. Secara khusus, peneliti ingin mengetahui apakah Lapas Kelas II B Amuntai memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menangani manajemen sarana dan prasarana.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, membawa peneliti pada kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai masih kekurangan yang di mana adanya petugas/staf melakukan *double job*, tetapi dari kinerjanya sudah cukup bagus. Sarana dan prasarana yang dikelola lumayan banyak, bukan cuma satu atau dua tapi ada ratusan sarana dan prasarana yang harus dikelola, sedangkan pengelolanya sendiri paling satu sampai empat orang, artinya adanya ketidaksinkronan antara fasilitas yang dikelola dengan petugas yang

mengelola. Untuk jumlah petugas pengamanan dalam satu regu masih kurang karena yang perlu dijaga sekitar 554 orang, idealnya satu regu itu minimal 8 orang tetapi yang sekarang masih 6 orang bersama komandan jaga, aturannya yang bagus itu P2U 2 orang, tetapi yang sekarang P2U masih 1 orang, jadi tersisa 4 orang untuk anggota jaga.

b. Standar

Standar adalah acuan atau pedoman yang digunakan sebagai tolok ukur untuk memastikan kualitas, ketepatan, dan konsistensi dalam berbagai hal. Standar dibuat untuk menjamin bahwa perlakuan yang diharapkan terhadap warga binaan sesuai dengan hak asasi manusia, keamanan, dan rehabilitasi yang efektif. Standar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada standar sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai.

Temuan dari hasil wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa standar sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai masih belum memadai, karena standar kamar hunian yang tidak sesuai sedangkan kapasitasnya 190 orang tetapi penghuninya sekitar 550 orang, untuk kamar tahanan maksimalnya 7 orang tetapi diisi 17 sampai 20 orang, tetapi sekarang sudah ditingkat untuk kamar huniannya, untuk kamar narapidananya maksimal 10 atau 15 orang tetapi diisi 30 sampai 40 orang, tembok Lapas yang kurang tinggi dikarenakan Lapas masih bangunan lama dengan tingginya sekarang 4m sedangkan standarnya itu 6m ditambah dengan kawat silet selebar 75cm dan 45cm, jadi kurang lebih tingginya sekitar 7m, untuk kamar baik itu luas maupun wc memang ada peraturannya, namun yang menjadi kendala adalah penghuni yang overkapasitas membuat wc tersebut belum mencukupi, dan untuk ruang kunjungan belum sesuai standar idealnya dipisah misalnya yang merokok dan tidak merokok, diberi sekat antara narapidana dengan keluarga yang mengunjungi, dan kawasannya masih kurang luas serta kurang aman. Ruang tahanan dan ruang narapidana belum terpisah. Solusi dari overkapasitas ini melalui program pemerintah yaitu pembangunan lapas-lapas baru dan pengurangan hunian melalui program bebas bersyarat dan lainnya. Sebagai bocoran akan dibangun Lapas di daerah Balangan, sehingga akan mengurangi overkapasitas di Lapas Amuntai.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Fungsi manajerial yang dikenal sebagai pelaksanaan adalah tentang melaksanakan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan berguna tanpa tindakan nyata, sehingga pelaksanaan merupakan fungsi manajerial yang penting. Inti dari pelaksanaan adalah untuk memastikan bahwa semua rencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif sehingga organisasi dapat memperoleh apa yang diinginkannya.

a. Pengadaan

Pengadaan adalah proses memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan yang diperlukan untuk mendukung operasional atau tujuan suatu organisasi. Tujuan utama dari pengadaan di lapas adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar, keamanan, dan layanan rehabilitasi dapat terpenuhi sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, “pengadaan” adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh bangunan fisik Lapas Kelas II B Amuntai dan infrastruktur terkait.

Temuan dari hasil wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa pengadaan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Amuntai masih minim, karena barang yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum menyeluruh misalnya di Bidang Umum masih ada yang kekurangan printer, tetapi untuk pengadaan sudah rutin dilakukan ketika terdapat barang yang rusak. Pengadaan MCK sejauh ini masih aman, namun terkendala di air yang masih terbatas, karena tidak menggunakan air PDAM tetapi menggunakan pompa air, upaya-upaya yang dilakukan pihak Lapas untuk mengatasi permasalahan ini dengan meminta bantuan secara bertahap seperti pompa air yang lebih besar dengan mengajukan proposal ke pihak ketiga, perihal keterbatasan air ini dipengaruhi oleh narapidananya sendiri yang sering mengabaikan air jika masih terbuka dari kran. Pengadaan sarana dan prasarana pada bidang pengamanan masih minim.

b. Pemeliharaan Fasilitas

Pemeliharaan fasilitas di Lembaga Pemasarakatan merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur, peralatan, dan fasilitas pendukung di lapas tetap berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar, demi mendukung operasional lapas serta menjaga kesejahteraan dan keamanan warga binaan dan petugas. Pemeliharaan fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada proses pemeliharaan fasilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Amuntai.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa pemeliharaan fasilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Amuntai untuk pelaksanaannya rutin dilakukan, tetapi prosesnya masih kurang baik, karena kurangnya petugas dalam pemeliharaan fasilitas tersebut, sebagian petugas yang bersikap cuek terhadap barang yang rusak dan tidak langsung melaporkan, anggaran yang masih kurang karena tidak sesuai dengan luas bangunan. Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan karena anggaran tersebut terfokus di pusat, pemerintah mengupayakan pembangunan lapas-lapas baru supaya mengurangi penghuni yang overkapasitas di Lapas Amuntai, sebagai bocoran akan ada pembangunan lapas baru di daerah Balangan dan lapas terbaru di wilayah Kalsel ada di daerah Batulicin, serta tidak semua petugas peka terhadap barang yang rusak.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Lembaga Pemasarakatan merupakan kewajiban berbagai pihak, baik petugas, pengelola, maupun warga binaan, untuk menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur guna memastikan keamanan, pembinaan, serta kesejahteraan seluruh penghuni lapas. Tanggung jawab petugas dalam kaitannya dengan manajemen sarana dan prasarana di Lapas Kelas II B Amuntai.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa tanggung jawab petugas terkait belum cukup baik terhadap sarana dan prasarana yang diawasinya, namun petugas sudah mengupayakan tanggung jawab dalam tugasnya masing-masing, terkadang masih terdapat staf yang melakukan *double job*, sebagian petugas yang kurang bertanggung jawab dalam fasilitas yang diberikan dan memelihara sarana dan prasarana, seperti diberikan senjata api sampai ada yang karatan, jika terjadi kebocoran atau cat terkelupas tidak langsung dilaporkan,

kurangnya tenaga kerja terutama bagian penjagaan, dan ruang kunjungan yang kurang aman, sebagian petugas terkadang tidak peka jika terdapat barang-barang yang rusak, misalnya kursi-kursi yang rusak langsung dibuang padahal prosedurnya harus dilakukan penghapusan. Bidang pengamanan petugas sudah bertanggung jawab semuanya, petugas terkadang ada melakukan penjagaan di lain jika ada keluarga narapidana yang ingin menikah maka petugas yang lepas dinas yang mengawal tersebut. Meskipun demikian, terdapat upaya yang cukup baik dari petugas dalam menjalankan tanggung jawab.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam hal lembaga pemasyarakatan, pengawasan infrastruktur dan fasilitas berarti mengawasi segala sesuatunya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai aturan. Infrastruktur dan fasilitas harus dapat mendukung kegiatan operasional agar pengawasan ini menjadi efektif.

a. Pengawasan terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana

Operasional Lapas yang efisien dan efektif, serta keamanan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat (narapidana dan petugas), bergantung pada kualitas sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Petugas yang bertanggung jawab dalam mengawasi kondisi sarana dan prasarana Lapas Kelas II B Amuntai menjadi fokus dalam penelitian ini.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa pengawasan terhadap sarana dan prasarana sudah baik, karena pengawasan sudah rutin setiap bulan, untuk pengawasan yang dilakukan setiap hari misalnya kontrol blok dan kontrol gelanggang, tetapi dengan penghuninya yang overkapasitas pasti masih ada yang terlewat, pengawasan dilakukan oleh petugas yang berwenang, pengawasan sudah dilakukan ke seluruh lingkungan Lapas artinya pengawasan kondisi sarana dan prasarana sudah dilakukan secara menyeluruh.

b. Mengevaluasi Kinerja Petugas

Petugas Lapas/ akan dievaluasi berdasarkan ketaatan mereka pada SOP, aturan yang relevan, dan penyediaan layanan yang profesional dan penuh kasih. Evaluasi kinerja petugas lapas yang dilakukan secara berkala dan objektif sangat penting untuk memastikan bahwa lapas tetap berfungsi dengan baik, memberikan perlindungan bagi petugas dan warga binaan. Mengevaluasi kinerja petugas yang dimaksud mengacu kepada pimpinan atau lembaga melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas yang bertanggung jawab dalam manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa mengevaluasi kinerja petugas terkait manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai sudah baik dan rutin dilakukan, karena dari Kalapas sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas setiap paginya yang bernama *coffee morning* dan evaluasi sudah ditetapkan di Menpan RB menjadi menjadi empat bagian atau pertriwulan. Kasi-Kasi yang lain pun juga rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. Evaluasi dilakukan tidak hanya sarana dan prasarana tetapi juga mencakup semuanya, biasanya ditanyakan apakah ada kerusakan yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta, masalah pembinaan anak, anggaran yang diserap sudah berapa persen, masalah

bimbingan kerja, sejauh mana progres program yang sudah direncanakan, apa saja kendala selama pelaksanaannya. Evaluasi pengamanan biasanya dilakukan oleh Kalapas seperti masukan supaya ke depannya bisa bertugas dengan benar, aman atau tidaknya blok hunian, ada keluhan apa yang disampaikan narapidana, masalah isi kamar hunian berapa, dan masalah ketersediaan makanan.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Sarana dan Prasarana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai

Berikut faktor-faktor yang memengaruhi Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, yaitu:

1. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran yang didapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, karena anggaran sangat diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, mengatasi penghuni yang overkapasitas, mendukung program pembinaan narapidana, peningkatan sistem keamanan, dan efisiensi operasional. Keterbatasan anggaran sering menjadi masalah signifikan yang memengaruhi dalam proses manajemen.

Data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa anggaran Lapas Kelas IIB Amuntai menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan dan belum sesuai dengan luas bangunan dapat menyebabkan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dan tidak bisa dilakukan sekaligus. Untuk meningkatkan jumlah anggaran yang dibutuhkan perlu upaya-upaya untuk memperbaiki aspek tersebut melalui ukuran luas bangunan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lapas membuat proposal ke pihak ketiga. Proposal yang telah tembus dari BRI berupa perbaikan plafon PVC dan pengaspalan halaman oleh Dinas PUPR.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang kurang di Lapas Kelas II B Amuntai menghambat dalam pengelolaan sarana dan prasarana, karena tenaga kerja yang cukup sangat penting untuk pemeliharaan infrastruktur secara berkala, penanganan yang cepat masalah teknis, mendukung keamanan dan stabilitas lapas, SDM yang memadai diperlukan untuk memastikan sarana dan prasarana, seperti bangunan, sistem sanitasi, dan fasilitas listrik mendapatkan perawatan rutin.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa adanya ketidaksesuaian antara SDM dengan sarana dan prasarana yang dikelola, adanya kondisi penghuni yang overkapasitas kondisi hunian kapasitasnya 190 orang tetapi diisi 500 orang lebih membuat pengawasan belum optimal, dan masih ada petugas yang melakukan *double job*. Perlu upaya untuk memperbaiki aspek tersebut salah satunya melalui penambahan tenaga kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai.

c. Kurangnya Kepedulian dari Petugas terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana di Lapas Kelas II B Amuntai salah satunya terhambat oleh kurangnya kepedulian petugas terhadap kondisi sarana dan prasarana,

karena peran aktif mereka sangat menentukan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang ada, seperti petugas yang peduli sangat cepat mendeteksi kerusakan atau kekurangan pada sarana dan prasarana, memeriksa dan merawat fasilitas secara rutin, serta menciptakan lingkungan yang layak dan manusiawi.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa kurangnya kepedulian petugas terhadap kondisi sarana dan prasarana membuat pengelolaan sarana dan prasarana belum optimal, petugas juga kadang-kadang tidak melaporkan jika terjadi kerusakan, dan masih ada kurangnya kepedulian petugas terhadap prosedur jika terdapat barang-barang yang rusak untuk penghapusan barang tersebut.

d. Adanya Kondisi Penghuni yang Overkapasitas

Kondisi yang overkapasitas dari narapidana menjadi salah satu faktor penghambat dalam manajemen sarana dan prasarana di Lapas Kelas II B Amuntai, karena situasi ini terjadi ketika jumlah penghuni Lapas jauh melebihi kapasitas yang dirancang, hal ini memiliki dampak besar pada kualitas layanan, keamanan dan keberlanjutan infrastruktur.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa kondisi penghuni yang overkapasitas membuat manajemen sarana dan prasarana belum optimal, baik dilakukan oleh petugas atau narapidana. Manajemen masih belum menjangkau semua bagian dan masih ada yang terlewat dikarenakan adanya keterbatasan SDM. Program pemerintah untuk solusi overkapasitas adalah pembangunan lapas-lapas baru dan pengurangan hunian melalui program bebas bersyarat.

2. Faktor Pendukung

a. Evaluasi yang Rutin Dilakukan

Evaluasi yang dilakukan secara rutin menjadi salah satu faktor pendorong dalam manajemen sarana dan prasarana di Lapas Kelas II B Amuntai, hal ini dikarenakan dapat membantu memastikan bahwa fasilitas di Lapas berfungsi dengan baik, mendukung operasional, dan memenuhi standar yang diperlukan. Evaluasi rutin memungkinkan identifikasi dini terhadap kerusakan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Melakukan evaluasi, Lapas dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai institusi pemasyarakatan yang manusiawi dan profesional.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa evaluasi rutin yang dilakukan dapat mendorong dalam manajemen sarana dan prasarana di Lapas Kelas II B Amuntai. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengetahui secara cepat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga bisa dicarikan solusinya bersama-sama, dan bermanfaat meningkatkan kinerja dari petugas yang berwenang.

b. Kinerja Petugas

Kinerja petugas menjadi salah satu faktor pendorong dalam manajemen sarana dan prasarana di Lapas Kelas II B Amuntai, karena petugas merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan fasilitas yang ada. Kinerja petugas merupakan peran penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan. Kinerja petugas yang baik akan memastikan perawatan fasilitas dilakukan secara rutin, sehingga fasilitas dapat digunakan secara optimal dan tahan

lama. Manajemen sarana dan prasarana membutuhkan petugas yang kompeten.

Wawancara dan observasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa kinerja petugas yang baik dapat mendorong dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Lapas Kelas II B Amuntai. Petugas yang melaksanakan sesuai wewenangnya dan berkompoten dapat membantu manajemen sarana dan prasarana di Lapas. Hal ini juga dilakukan upaya-upaya oleh petugas meminta bantuan ke instansi lain.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu: Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari tujuh indikator yang belum berhasil yaitu: *Pertama*, tujuan utama belum terlaksana dengan semestinya karena kurangnya anggaran dan jumlah SDM, serta penghuni yang overkapasitas. *Kedua*, anggaran yang direncanakan belum optimal, karena ketidaksesuaian antara anggaran yang diajukan dengan anggaran yang diperoleh dan masih kurangnya monitoring yang teratur terkait apa-apa saja yang perlu dianggarkan. *Ketiga*, Sumber Daya Manusia masih kekurangan karena adanya petugas/staf melakukan *double job*, sedangkan sarana dan prasarana yang dikelola cukup banyak, tetapi dari kinerjanya sudah cukup bagus. *Keempat*, standar belum memadai karena penghuni yang overkapasitas, Lapas masih bangunan lama, tembok yang kurang tinggi, wc yang belum mencukupi dalam setiap kamar karena kondisi overkapasitas narapidana, dan ruang kunjungan yang kurang luas serta kurang aman. *Kelima*, pengadaan yang masih minim, karena barang yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum menyeluruh namun pengadaan tersebut dilakukan secara bertahap. *Keenam*, pemeliharaan fasilitas yang pelaksanaannya rutin dilakukan, tetapi prosesnya masih kurang baik, karena kurangnya petugas dalam pemeliharaan fasilitas, kurangnya anggaran untuk pemeliharaan, dan tidak semua petugas peka terhadap barang yang rusak. *Ketujuh*, tanggung jawab belum cukup baik, karena masih terdapat staf yang melakukan *double job*, petugas yang kurang bertanggung jawab dalam fasilitas yang diberikan dan memelihara sarana dan prasarana namun, terdapat upaya yang cukup baik dari petugas dalam menjalankan tanggung jawab. Dan ada dua indikator yang berhasil, yaitu: *Pertama*, pengawasan kondisi sarana dan prasarana sudah baik, karena pengawasan sudah rutin dilakukan oleh petugas yang berwenang, pengawasan sudah dilakukan ke seluruh lingkungan di Lapas, artinya pengawasan kondisi sarana dan prasarana sudah dilakukan secara menyeluruh. *Kedua*, mengevaluasi kinerja petugas sudah baik dan rutin dilakukan, karena dari lembaga sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas setiap paginya yang bernama *coffee morning* dan evaluasi dari pusat juga dilakukan pertiga bulan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, ada dua elemen yang memengaruhi manajemen sarana dan prasarana, yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kepedulian petugas terhadap kondisi sarana dan prasarana, dan adanya kondisi penghuni yang overkapasitas. Faktor pendorongnya adalah evaluasi yang rutin dilakukan dan kinerja petugas.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Hasbiyah, S., & Fatmawati, A. 2023. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 2, No. 11. Tersedia: <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/1826/1738>

Muhfizar, dkk. 2021. *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Tersedia: <https://id.scribd.com/document/676275881/Pengantar-Manajemen-Teori-Dan-Konsep>

Rahayu, T. A., Erawan, E., & Passele, E. 2021. Manajemen Organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMANEGA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 9, No. 1. Tersedia: [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/04/e%20Journal%20Tika%20\(04-14-21-12-25-15\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/04/e%20Journal%20Tika%20(04-14-21-12-25-15).pdf)

Sukmadinata, Nana S. 2000. *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Indonesia Negara Hukum.

Widiana, Muslichah Erna. 2020. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Jawa Tengah: CV: Pena Persada. Tersedia: <http://eprints.ubhara.ac.id/1291/1/E-Book%20Pengantar%20Manajemen.pdf>